

**EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KOTA MANADO***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL-BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET AGENCY (BKAD) MANADO CITY*

Oleh:

**William Juan Wawointana<sup>1</sup>****David P.E Saerang<sup>2</sup>****Dhullo Afandi<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[williamwawointana@gmail.com](mailto:williamwawointana@gmail.com)<sup>1</sup>[d\\_saerang@unsrat.ac.id](mailto:d_saerang@unsrat.ac.id)<sup>2</sup>[afandiafandibaksh@gmail.com](mailto:afandiafandibaksh@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Meningkatnya permintaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam APBD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada BKAD Kota Manado telah sesuai dengan konsep akrual basis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengakuan pendapatan dan beban telah sesuai dengan SAP Berbasis Akrual berdasarkan dokumen – dokumen yang ada, pelaporan pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dan telah sesuai dengan SAP Berbasis Akrual, dan pengungkapan pendapatan dan beban Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan. Dan untuk beban, hal-hal yang perlu diungkapkan yaitu Pengeluaran beban tahun berkenaan, Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, Penjelasan pengaruh perubahan kebijakan, Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**Kata Kunci:** SAP berbasis akrual, pengakuan, pengungkapan, pendapatan, beban

**Abstract:** The increasing demand for good government governance has encouraged the central government and local governments to implement public accountability. Accrual-based government accounting standards are government accounting standards that recognize revenue, expenses, assets, debt and equity in accrual-based financial reporting and recognize revenue, expenditure and financing in reporting on the implementation of the budget basis set out in the APBD. The method used in this research is descriptive qualitative. The object of this research is the Manado City Financial and Regional Asset Agency (BKAD). The purpose of this study is to determine the application of accrual-based Government Accounting Standards at BKAD Manado City is in accordance with the accrual basis concept. The research results obtained are the recognition of income and expenses in accordance with Accrual-Based SAP based on existing documents, income and expense reports are reported in budget realization reports and operational reports and are in accordance with Accrual-Based SAP, and disclosure of income and expenses. because the revenue target has not been achieved, and other information that needs to be disclosed. And for expenses, matters that need to be disclosed, namely Expenditures for the current year expenses, Recognition of current year expenses after the expiration date of the accounting period / fiscal year as an explanation of the differences between the recognition of expenditures, Explanation of the effect of policy changes, Other information deemed necessary.

**Keywords:** accrual based SAP, recognition, disclosure, income, expenses

### Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya permintaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2010 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat nasional.

Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010, salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga laporan keuangan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah bisa menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik agar lebih terciptanya akuntabilitas.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dimana pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan, sehingga peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari PP No. 24 Tahun 2005. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya).

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah berbasis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun, perubahan yang dianggap lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pernyataan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul. Sedangkan pada tahun 2015 seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Laporan keuangan pemerintah kota manado mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK sehingga badan keuangan pemerintah kota manado sangat baik dalam menyajikan informasi maupun pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan khususnya penerapan akrual basis pada laporan keuangan. dan sesuai tekad walikota manado untuk mempertahankan opini tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dengan judul Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI pada BKAD Kota Manado

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengakuan Pendapatan**

(Siregar, 2018) menjelaskan Pengakuan pendapatan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (biaya) kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tercermin dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak.

### **Pelaporan Pendapatan**

(Menurut Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Standar Akuntansi Penyajian Pendapatan meliputi : Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

### **Pengakuan Beban**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan modal.

### **Pelaporan Beban**

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pada dasar akruaI, beban dan pendapatan yang saling terkait dilaporkan pada periode yang sama. Sebagai contoh, upah karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode dimana karyawan memberikan jasa dan bukan pada saat upah dibayarkan (Simbolon, 2016).

### **Pengungkapan Pendapatan**

Menurut (Sari, 2016) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **Pengungkapan Beban**

Menurut (Wadiyo 2020) Pengungkapan Laporan Keuangan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana informasi Laporan Keuangan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pengungkapan laporan keuangan adalah bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian dalam bentuk seperangkat penuh Laporan Keuangan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban Menurut (Sari, 2016) yaitu :

1. rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu diungkapkan

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2010 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

### **Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut (Fakhrurazi, 2016) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

### **Akuntansi Basis Akrua**

Akuntansi Berbasis akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selanjutnya, dalam makalah yang sama, KSAP menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

### **Manfaat Akuntansi Berbasis Akrua**

Pada penyusunan dan penerapannya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memang cukup memberi dilema tersendiri bahkan banyak tekanan dan tantangan yang terjadi. Namun demikian, akuntansi berbasis akrual di suatu organisasi pemerintahan memiliki beberapa manfaat yang diperoleh yaitu:

1. Sebagai bentuk pelaksanaan konsep pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*).
2. Sebagai suatu peluang untuk menerapkan prinsip *cost againsts revenue*.
3. Sebagai suatu fondasi untuk melakukan perhitungan biaya produk atau pelayanan yang lebih baik.
4. Sebagai suatu sarana penghitungan nilai subsidi yang lebih baik atas setiap produk dan/atau pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
5. Sebagai suatu bentuk analisis keekonomisan dan keefisienan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
6. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah.
7. Sebagai upaya meningkatkan kualitas standar analisis biaya (SAB) bukan lagi hanya sekadar standar analisis belanja (SABe).
8. Sebagai suatu bantuan penerapan pendekatan anggaran kinerja (*performance budget*) dan *mind term expenditure framework* (MTEF) dalam penganggaran.

### **Kelebihan dan Kelemahan Basis Akrua**

Menurut KSAP dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Menurut Bastian (2015:118-119), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut: pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan

pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

Kemudian menurut Bastian (2015:120), beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain: pertama, penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat. Kedua, relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. Ketiga, dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Keempat, peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

### **Penelitian Terdahulu**

Agnes (2016) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan PEMDA Provinsi NTT Hasil penelitian menunjukkan Pemprov NTT masih mengalami banyak hambatan dalam proses penerapan SAP Berbasis Akrual. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yakni ketidaksesuaian latar belakang pendidikan PPK, kurangnya pemahaman pengelola keuangan terhadap basis akrual, serta koordinasi pengelolaan aset dengan Dispenda yang masih belum berjalan

Dimas (2016) dalam penelitian yang berjudul Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di kabupaten jombang. Dari hasil penelitian Implementasi SAP berbasis akrual yang dilakukan masih memiliki kendala yaitu belum sepenuhnya relevan, mutakhir, SDM pengelola keuangan yang belum memiliki kompetensi bersyarat, dan dalam segi teknologi informasi aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi secara vertical dan horizontal

Alfonsus (2018) dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah Hasil penelitian menunjukkan Kuaitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pada pemerintah daerah kabupaten manggarai belum siap. Komitmen organisasi memiliki kontribusi yang paling berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Saprudin (2017) dalam penelitian yang berjudul Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo) Dari hasil penelitian Berdasarkan uji parsial dan uji simultan keduanya berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal itu ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi, yaitu dengan nilai R square sebesar 0,289. Yang memperlihatkan bahwa 28,9% penerapan SAP basis akrual dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sedangkan sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini

Jumania (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis dampak penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Dari hasil penelitian menunjukkan Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu perubahan komponen laporan keuangan yang disajikan lebih rinci mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, juga informasi mengenai asset dan penyusutan asset tetap sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mengetahui proses akuntansi pada BKAD Kota Manado sudah sesuai dengan SAP Berbasis Akrual

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi tempat di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado di Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara dengan waktu penelitian dari bulan februari 2020 sampai selesai.

### **Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang berupa Pedoman Akuntansi Perwal Tupoksi BKAD dan struktur Organisasi pada BKAD Kota

Manado. Data kuantitatif yang digunakan berupa Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2019, Laporan Operasional instansi tahun 2018-2019, memo penerimaan dan pengeluaran kas Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari BKAD Kota Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu pihak BKAD Kota Manado untuk memperoleh gambaran umum instansi mengenai proses dan konsep akrual basis dalam transaksi pemerintahan mulai pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan dan beban
- b. Dokumentasi berupa pengumpulan dokumen dan catatan-catatan yang dimiliki instansi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi

### Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif

### Proses Analisis Data

Proses menganalisis data dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pengakuan pendapatan dan beban yaitu dengan membandingkan data transaksi dengan SAP serta konsep akrual basis. Dalam melakukan perbandingan akan diuji dengan beberapa transaksi. Perbandingan tersebut menghasilkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara pengakuan pendapatan dan beban BKAD dengan SAP dan konsep akrual basis
2. Mengevaluasi pelaporan pendapatan dan beban yaitu dengan melakukan review penyajian pendapatan dan beban terhadap laporan keuangan BKAD dibandingkan dengan penyajian pendapatan dan beban berdasarkan SAP dan konsep akrual basis. Perbandingan tersebut menghasilkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara pelaporan pendapatan dan beban BKAD dengan SAP dan konsep akrual basis
3. Proses evaluasi pengungkapan terhadap pendapatan dan beban yakni dilakukan sebagai berikut. Yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh BKAD terhadap pendapatan dan beban akan ditelaah hal-hal yang telah diungkapkan sehubungan pendapatan dan beban, kemudian akan dibandingkan dengan pengungkapan berdasarkan SAP dan konsep akrual basis.
4. Setelah menganalisis pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan dan beban instansi maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Transaksi Pendapatan Transfer

Tgl 06/01/19 Diterima dokumen pengesahan anggaran atas penerimaan dana transfer DAU (Dana Alokasi Umum) tahun 2019 dari pemerintah pusat tentang penetapan dana alokasi umum untuk pelaksanaan desentralisasi sebesar Rp. 80.000.000.000 . Pada tanggal tersebut telah terjadi transaksi dibuktikan dengan dasar dokumen penetapan alokasi sesuai tanggal pengalokasian dan ditandatangani oleh pejabat pemerintah pusat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta persetujuan yang mendasari alokasi dana tersebut. Transaksi tersebut akan dicatat dengan jurnal :

06/01/19 Piutang Transfer DAU	80.000.000.000
Pendapatan Transfer DAU-LO	80.000.000.000

Tgl 15/02/19 Diterima nota kredit dari bank atas pencairan dana transfer DAU dari pemerintah pusat yang berisikan lampiran serah terima dana dan tanggal yang tercantum sesuai dengan tanggal alokasi pada dokumen penetapan sebesar Rp. 80.000.000.000 yang dicatat dengan jurnal:

15/01/19 Kas di kas daerah	80.000.000.000
Piutang transfer DAU	80.000.000.000

#### 2. Transaksi Pendapatan Pajak

Diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh BAPENDA Kota Manado sebagai ketetapan atas PBB tgl 06/02/19 sebesar Rp. 2.400.000 dokumen SKPD berisikan tanggal penetapan pajak serta jumlah yang harus dibayarkan oleh WP beserta tanda tangan pejabat pemungutan penerimaan daerah Pada tanggal tersebut akan dicatat berdasarkan bukti SKPD dengan jurnal :

06/02/19 Piutang PBB	2.400.000
Pendapatan Pajak PBB	2.400.000

Tgl 16/02/19, Berdasarkan ketetapan Pajak, Wajib Pajak melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.400.000 sebelum jatuh tempo dibuktikan dengan STS dengan lampiran seperti pada SKPD yang ditandatangani penerima dan penyeter. transaksi dicatat dengan jurnal :

16/02/19 Kas di Bendahara penerimaan BAPENDA	2.400.000
Piutang PBB	2.400.000

Tgl 17/02/19, Bendahara Penerimaan BAPENDA menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah sebesar Rp. 2.400.000 yang akan dijurnal sebagai berikut :

17/02/19 Kas di kas daerah	2.400.000
Kas di bendahara penerimaan BAPENDA	2.400.000

### 3. Transaksi Pendapatan Retribusi

Tgl 20/02/19 diterbitkan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima sebesar Rp. 35.000.000 SKR tertanggal tersebut ditandatangani oleh penerima retribusi untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Pada tanggal tersebut telah terjadi transaksi yang akan dicatat dengan jurnal :

20/02/19 Piutang Retribusi	35.000.000
Pendapatan retribusi	35.000.000

### 4. Transaksi Beban Pegawai

Tgl 06/06/19 bendahara pengeluaran menerima SP2D atas pembayaran gaji bulan juli sebesar 404.866.776 dengan rincian sebagai berikut : Gaji pokok PNS Rp. 331.326.400 , tunjangan keluarga Rp. 26.178.698 , tunjangan jabatan Rp. 17.905.000 , tunjangan beras Rp. 16.946.280 , tunjangan khusus Rp. 170.508. SP2D tertanggal sesuai waktu pencairan dana dan ditandatangani oleh BUD berdasarkan bukti SP2D tersebut, PPKD akan mencatat transaksi dengan jurnal :

06/06/19 Kas di bendahara pengeluaran	404.866.776
R/K PPKD	404.866.776

Tgl 02/07/19 bendahara pengeluaran menerima transfer pembayaran R/K PPKD untuk pembayaran beban pegawai dan disetorkan kepada masing-masing PNS dengan bukti STS dengan nomor sesuai tanggal transfer serta bank dan no rekening tujuan dengan jurnal :

02/07/19 Beban Gaji Pegawai	404.866.776
Kas dibendahara pengeluaran	404.866.776

### 5. Transaksi Beban Barang dan Jasa

Tgl 30/10/19 dilakukan pembayaran ATK dengan pembayaran langsung (LS) pada pihak ketiga sebesar 50.000.000 berdasarkan dokumen SP2D tanggal tersebut dan ditandatangani oleh penerima. Lampiran SP2D berisikan BAST (Berita Acara Serah Terima) ATK. Serah terima ATK ditandatangani oleh penerima barang yaitu pihak BKAD dan yang menyerahkan barang. Tanggal yang tercantum di BAST sesuai tanggal diterima barang. transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal :

30/10/19 Beban Barang/jasa	50.000.000
R/K PPKD	50.000.000

### 6. Transaksi Beban Bantuan Sosial

Tgl 20/05/19 Pemerintah Kota Manado mengeluarkan SK tentang penerima bantuan sosial berupa santunan dan BAST berita acara serah terima uang santunan yang berisikan nama penerima, jumlah santunan yang ditandatangani penerima santunan dan yang menyerahkan santunan sesuai tanggal yang tercantum sebesar Rp.5.000.000. berdasarkan SK dan BAST maka telah terjadi transaksi yang akan dicatat dengan jurnal :

20/05/19 Beban BanSos Santunan	5.000.000
Utang Bansos Santunan	5.000.000

Kemudian tgl 30/05/19 pemerintah melakukan transaksi. jurnal yg digunakan untuk mencatat transaksi ini adalah

30/05/19 Utang Beban Bansos santunan	5.000.000
Kas di kas daerah	5.000.000

Badan keuangan dan aset daerah kota manado dalam membuat laporan pendapatan berpedoman pada peraturan walikota manado nomor 52 tahun 2017. Pendapatan transfer, pendapatan pajak, dan pendapatan retribusi dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. jumlah yang dilaporkan yaitu rekapitulasi dari jumlah yang tercatat pada buku besar dan dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer, pendapatan pajak, dan pendapatan retribusi tahun sebelumnya.

Badan keuangan dan aset daerah kota manado dalam membuat laporan beban berpedoman pada peraturan walikota nomor 52 tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi. Beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban

bantuan sosial dilaporkan pada laporan operasional. jumlah yang dilaporkan sesuai rekapitulasi dari jumlah yang tercatat pada buku besar dan dibandingkan dengan jumlah beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban bantuan sosial tahun sebelumnya.

Pendapatan dan beban dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan BKAD Kota Manado terkait dengan pendapatan yaitu. Perbandingan pendapatan asli daerah-LO dan PAD-LRA, Perbandingan realisasi pendapatan LO tahun 2019 dengan tahun 2018 mulai dari Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan BKAD Kota Manado terkait dengan beban yaitu. Perbandingan beban-LO, pengeluaran beban tahun 2019 dengan tahun 2018 beserta jenis beban.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan pendapatan dan beban di BKAD kota manado maka dapat dievaluasi sebagai berikut:

### **1. Evaluasi pengakuan pendapatan dan beban di BKAD Kota Manado.**

Pendapatan transfer, Pendapatan pajak, dan Pendapatan retribusi diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan saat pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. maka dapat dikatakan untuk pengakuan pendapatan transfer, pendapatan pajak, dan pendapatan retribusi telah sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Beban pegawai, Beban barang dan jasa, dan beban bantuan sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset, saat timbulnya kewajiban, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. maka untuk pengakuan beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban bantuan sosial telah sesuai dengan SAP berbasis akrual.

### **2. Evaluasi pelaporan pendapatan dan beban di BKAD Kota Manado.**

Badan keuangan dan aset daerah kota manado membuat laporan pendapatan yaitu Pendapatan transfer, pendapatan pajak, dan pendapatan retribusi dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. jumlah yang dilaporkan yaitu rekapitulasi dari jumlah yang tercatat pada buku besar dan dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer, pendapatan pajak, dan pendapatan retribusi tahun sebelumnya.

Badan keuangan dan aset daerah kota manado membuat laporan beban yaitu Beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban bantuan sosial dilaporkan pada laporan operasional. jumlah yang dilaporkan sesuai rekapitulasi dari jumlah yang tercatat pada buku besar dan dibandingkan dengan jumlah beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban bantuan sosial tahun sebelumnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, BKAD Kota Manado dalam melakukan pelaporan atas Pendapatan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual yang termuat dalam PSAP No.12 Paragraf 21 yaitu pendapatan dilaporkan pada Laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sedangkan beban dilaporkan pada laporan operasional BKAD kota manado.

### **3. Evaluasi pengungkapan pendapatan dan beban di BKAD Kota Manado**

Pendapatan transfer dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang berupa perbandingan pendapatan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. pendapatan pajak dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang berupa perbandingan pendapatan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan pendapatan asli daerah LO dan PAD-LRA. pendapatan retribusi dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang berupa perbandingan pendapatan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan pendapatan asli daerah LO dan PAD-LRA. Sehingga jika dilihat dari kejadian yang ada pada tahun tersebut maka BKAD kota manado melakukan pengungkapan pendapatan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Beban pegawai diungkapkan berdasarkan pengakuan beban gaji, tunjangan dan beban tambahan penghasilan PNS tahun 2019 memperhitungkan realisasi pembayaran dimana pada Pengakuan yang dimaksud yaitu pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode. Oleh karena itu pengungkapan berdasarkan pengakuan beban tersebut merupakan hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. beban barang dan jasa yang diungkapkan yaitu kenaikan realisasi tahun 2019 dengan pengeluaran terbesar terdapat pada beban jasa. beban bantuan sosial yang diungkapkan yaitu peningkatan beban bantuan sosial tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga jika dilihat dari kejadian yang ada pada tahun tersebut maka BKAD kota manado melakukan pengungkapan beban telah sesuai dengan SAP berbasis akrual.



### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Pengakuan pendapatan dan beban di BKAD Kota Manado telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen terkait. Pendapatan di BKAD Kota Manado diakui berdasarkan tanggal penetapan pada dokumen dan beban diakui sesuai tanggal serah terima.
2. Pelaporan pendapatan dan beban di BKAD Kota Manado telah sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yaitu pendapatan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sedangkan beban dilaporkan pada laporan operasional.
3. Pengungkapan pendapatan dan beban di BKAD kota manado telah sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. untuk pendapatan hal-hal yang perlu diungkapkan yaitu Penerimaan pendapatan, Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan terjadi hal hal yang bersifat khusus, Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan. Dan untuk beban, hal-hal yang perlu diungkapkan yaitu Pengeluaran beban tahun berkenaan, Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, Penjelasan pengaruh perubahan kebijakan, Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang memperlihatkan bahwa pengakuan, pelaporan, pengungkapan transaksi keuangan BKAD Kota Manado telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual maka kiranya hal ini tetap dipertahankan seterusnya agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap dapat diandalkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Devia. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan PEMDA Provinsi NTT. *Skripsi*. STIE Perbanas. Surabaya. <http://eprints.perbanas.ac.id/3018/> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Erlina, Omar, Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah : Berbasis Akrual*. Salemba Empat, Jakarta.
- Fatmawati, Devia. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Malang. <http://eprints.umm.ac.id>jipt...PDFanalisispenerapanstandarakuntansipemerintahan> Diakses tanggal 02 juli 2021
- I Wayan, Alfonsus. 2018. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 13, No.1 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11172/10706> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S. W. Alexander. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Lamonisi. 2016. Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah kota tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No.1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592/11188> Diakses tanggal 02 juli 2021
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010 *Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 2010*. Jakarta.

Pemerintah Kota Manado. 2017 *Peraturan Walikota Manado Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kota Manado*. 2017. Manado

Sampel, Indra Franselski. (2015). Analisis Kesiapan pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis AkruaI. Jurnal EMBA Vol.3no.1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7325> Diakses pada tanggal 20 february 2021 hal. 621-630.

